

► TRANS-SUMATRA

Menanti Aksi Hutama Karya di Sumatera

Yakin dapat merangsang perekonomian di Sumatera, meskipun tidak layak secara finansial, pemerintah tetap akan membangun jalan tol trans-Sumatra. Guna mewujudkan jalan tol tersebut, skema pelaksanaan pun dirancang.

Dimas Novita S.
redaksi@bisnis.co.id

Pertama, pemerintah tengah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) jalan tol baru selain PT Jasa Marga Tbk, yakni PT Hutama Karya. Kedua, sejumlah dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga disiapkan.

Selain itu, pemerintah tak segan akan menyisihkan dividen pendapatan BUMN untuk membiayai jalan tol tersebut, bahkan akan menjadi penjamin untuk memberikan suku bunga yang lebih rendah kepada Hutama Karya.

Penugasan tersebut disebabkan oleh rendahnya *financial internal rate return* (FIRR) jalan tol tersebut yang hanya berkisar 6%-13%. Idealnya FIRR sebuah jalan tol minimal 18%.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazaly mengatakan untuk menunjuk BUMN tersebut diperlukan peraturan yang dapat memayungi keputusan tersebut.

Saat ini, Kementerian BUMN, Kementerian PU, Kemenkeu, dan Sekretaris Negara sedang menyusun aturan tersebut dengan revisi PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol dan akan menerbitkan peraturan presiden mengenai penunjukan Hutama Karya, meskipun seharusnya beleid tersebut sudah rampung pada Januari 2013.

Perpres belum turun, uji-ujuk Menteri BUMN Dahlan Iskan menginstruksikan pengerjaan pembangunan tiga ruas yakni Medan-Tebingtinggi, Bakauheni-Bandar Lampung, dan Palembang-Indralaya dimulai pada semester pertama tahun ini.

Tampaknya Dahlan tidak memperlakukan penerbitan perpres. Karena, menurutnya, yang terpenting adalah memulai pengerjaan karena memulai pekerjaan itu sangat susah.

Meskipun berkukuh ingin proses pengerjaan ruas jalan tol tersebut segera dimulai, dirinya

tidak menargetkan harus sesuai dengan keinginan.

"Mau dua ruas jalan tol terlebih dahulu juga tidak apa-apa atau satu ruas pun juga tidak masalah," tuturnya.

Penunjukan Hutama Karya pun tak lepas dari sejumlah alasan. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Hutama Karya menjadi opsi karena selain memiliki pengalaman dalam bisnis jalan tol, perusahaan itu merupakan BUMN konstruksi yang belum *go public*, sehingga dalam pengendaliannya pun masih dapat dikontrol secara penuh oleh pemerintah.

Perlunya pembentukan BUMN jalan tol selain PT Jasa Marga Tbk disebabkan oleh perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, sehingga dalam kegiatannya memerlukan persetujuan dari para pemegang saham. Padahal banyak sekali proyek pemerintah yang perlu digarap sendiri dengan alasan kurangnya kelayakan.

"Kuota proyek pemerintah masih sangat banyak, sehingga diharapkan Hutama Karya akan fokus dan dijaga agar tidak *listring*," katanya.

Bukan hanya pemerintah yang 'memersolek' diri untuk mempersiapkan megaprojek di Sumatera tersebut, Hutama Karya juga sudah mempersiapkan diri dan sejumlah perencanaan strategis.

JUAL KEMBALI

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Ari Widiantoro mengatakan mengingat besarnya nilai investasi trans-Sumatra, maka perusahaan akan menjual proyek jalan tol yang segera dibangun kepada investor guna membiayai proyek berikutnya, setelah konstruksi rampung.

"Ketika pembangunan selesai akan langsung kami tawarkan kepada investor baru dan kami yakin ruas jalan tol ini dapat mendorong perekonomian di sekitarnya," ujarnya.

Hal ini dilakukan tidak lebih untuk terus memasok pundi-pundi-

Proyek Jalan Tol Utama Trans-Sumatra

Ruas	Panjang (Km)	IRR (%)	Perkiraan Investasi (Rp Triliun)
Lampung-Palembang	358	17	44
Palembang-Pekanbaru	610	13	95
Pekanbaru-Medan	548	16	64
Medan-Banda Aceh	460	9	95
Palembang-Bengkulu	303	9	63
Pekanbaru-Padang	242	11	35
Medan-Sibolga	172	7	30



di uang agar jalan tol dengan investasi Rp360 triliun tersebut dapat terbangun.

Mengetahui akan ada proyek infrastruktur dibangun di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Sumatera juga membuka tangan terhadap pembangunan jalan tol ini. Salah satunya yakni Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang siap membebaskan lahan seluas 132 ha guna mendukung pembangunan trans-Sumatra ruas Palembang-Indralaya.

Alex berharap pembebasan lahan dapat selesai dalam waktu cepat sebelum Maret tahun depan. Tim yang dibentuk itu nantinya akan langsung terjun untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan.

► Penugasan disebabkan oleh rendahnya *financial internal rate return*.

► Hutama Karya berencana menjual proyek jalan tol yang segera dibangun.

► Sumatera Selatan juga membuka tangan terhadap pembangunan jalan tol.

Dia menilai proyek jalan tol ini memiliki prospek yang bagus meski belum menguntungkan secara finansial.

Namun, optimisme ditunjukkan oleh Hutama Karya. Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjayanto meyakini jalan tol trans-Sumatra memungkinkan untuk dikembangkan secara finansial. Akan tetapi, untuk tahap awal tujuannya adalah untuk membangkitkan ekonomi antara titik-titik yang terhubung oleh jalan tersebut.

"Jika perekonomian antardesa yang dihubungkan meningkat, dapat mendorong pendapatan per kapita masyarakat yang pada akhirnya akan memungkinkan untuk layak secara finansial," katanya.

Hak 'prerogatif' Hutama Karya untuk membangun jalan tol ini sebenarnya menguntungkan karena masalah yang biasanya mendera badan usaha jalan tol (BUJT) lainnya yakni pembebasan tanah tidak lagi akan menyita proses konstruksi. ■